

ABSTRAK

Yayasan (*Stitching*) adalah badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota, dalam definisi diuraikan pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 16/ 2001, pendirian yayasan bersifat deklaratif karena bisa didirikan oleh satu subjek hukum atau manusia atau badan hukum perdata atau badan hukum publik saja. Yayasan Kas Pembangunan yang selanjutnya disebut YKP, dibentuk oleh Pemerintahan Kota Surabaya pada Tahun 1951 dengan seluruh modal dan aset berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah atau surat ijo, yaitu tanah negara bekas *eigendom verponding*. Bukti kepemilikan YKP oleh Pemkot Surabaya yang dari berdirinya selalu diketuai rangkap jabatan oleh Walikota Surabaya hingga Tahun 1999, YKP dijabat Walikota Sunarto. Aspidus Kejati Jawa Timur Didik Farkhan Alisyahdi menerima surat pernyataan dari Ketua Pembina Yayasan Kas Pembangunan, bahwa para Pembina mengundurkan diri dan menyerahkan seluruh aset Yayasan Kas Pembangunan dan PT YEKAPE ke Pemerintah Kota Surabaya dan ditanda tangani oleh seluruh anggota dewan pengurus. Berdasarkan hal tersebut maka ada dua permasalahan yang dibahas yaitu Kekuatan pembuktian surat pernyataan dalam pengembalian aset Pemerintah Kota Surabaya dan Keabsahan surat pernyataan dalam pengembalian aset Pemerintah Kota Surabaya dari Yayasan Kas Pembangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif, Teori Pengembalian Aset dan Bentuk Pengalihan Aset. Surat pernyataan dalam pengembalian aset Pemerintah Kota Surabaya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dalam perkara perdata, Keabsahan surat pernyataan yang tercantum pada Pasal 1866 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditempatkan pada peringkat teratas, yang sekaligus menjelaskan pentingnya bukti tulisan dalam pembuktian perkara perdata dan bukti tulisan pada dasarnya sudah menjadi suatu bukti

Kata Kunci : Keabsahan, Surat Pernyataan, Yayasan Kas Pembangunan, Alat Bukti, Akta Di Bawah Tangan.

ABSTRACT

Foundation (Stitching) is a legal entity consisting of assets that are separated and intended to achieve certain goals in the social, religious and humanitarian fields that do not have members, in the definition described in Article 1 paragraph (1) of Law No. 16/2001, the establishment of a foundation is declarative because it can be established by one legal subject or person or a civil legal entity or a public legal entity only. The Cash Development Foundation, hereinafter referred to as Yayasan Kas Pembangunan, was formed by the Surabaya City Government in 1951 with all capital and assets in the form of land totaling 3,048 parcels of land or green letters, namely the former state land of the former eigendom verponding. Evidence of the ownership of Yayasan Kas Pembangunan by the Surabaya City Government, which from its establishment was always chaired by concurrently by the Mayor of Surabaya until 1999, YKP was held by Mayor Sunarto. East Java Attorney General's Office Aspidus Didik Farkhan Alisyahdi received a statement from the Head of the Development Cash Foundation, that the coaches resigned and handed over all assets of the Kas Pembangunan Foundation and PT YEKAPE to the Surabaya City Government and signed by all members of the board of management. Based on this, there are two problems discussed, namely the power of proof of a statement letter in returning the assets of the Surabaya City Government and the validity of the statement letter in returning the assets of the Surabaya City Government from the Kas Pembangunan Foundation. The research method used is normative legal research, namely legal research by means of a problem approach carried out using a Restorative Justice approach, Asset Return Theory and Asset Transfer Forms. The statement letter in the return of assets of the Surabaya City Government has the power of proof as an underhand deed in a civil case, the validity of the statement listed in Article 1866 paragraph 1 of the Civil Code is placed at the top rank, which also explains the importance of written evidence in proving a case civil and written evidence has basically become evidence

Keywords : *Legality, Statement Letter, Cash Development Foundation, Evidence, letter under hand.*